

**Manajemen Berbasis Sekolah pada Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah  
Atas Al-Mas'udiyah Semarang**

**Muhammad Alwi Maftuhul Huda<sup>1</sup>, Hamam<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia

<sup>1</sup>alwi.almasudiy@gmail.com, <sup>2</sup>hamsya2016@gmail.com

**Abstrak**

School-based management allows schools to manage institutions according to their abilities. This authority applies to managing all school lines, including resources, teaching staff, and curriculum. This study aims to explain how Islamic religious education at SMA Al Mas'udiyah Bandungan is based on the principles of school-based management. This research used a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, documentation, and observations of the research object. Based on the research and discussion results, it was concluded that (1) the independence of SMA Al Mas'udiyah was implemented through the independence of curriculum development, independence in the procurement of educators, and independence in facilities and infrastructure. (2) Participation in Islamic religious education occurs internally and externally. Internal comes from school residents, while external comes from the community, boarding schools, and the government. (3) Openness at Al Mas'udiyah High School is implemented through meetings with the community in the socialization of education programs and opening access to information for the community through the school committee or visiting the school directly.

**Keywords:** Islamic Religious Education, School-based Management, Senior High School.

**Pendahuluan**

Pendidikan agama Islam (PAI) sebagai salah satu mata pelajaran mendapatkan perhatian yang serius oleh para praktisi pendidikan di Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan tujuan PAI tidak hanya aspek kognitif, namun juga diharapkan peserta didik dapat mengamalkan ilmunya di kehidupan nyata. PAI sendiri didefinisikan sebagai upaya bimbingan serta asuhan terhadap peserta didik agar mereka dapat mengaplikasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik juga diharapkan memahami ajaran-ajaran islam dan menjadikannya sebagai pijakan pemikiran.<sup>2</sup>

Dasar operasional pelaksanaan PAI terletak pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bab I tentang ketentuan umum pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

---

<sup>1</sup> Moh Rofie, "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan)," *Reflektika* 12, no. 2 (14 Februari 2018): 149–69, <https://doi.org/10.28944/reflektika.v12i2.104>.

<sup>2</sup> Zakiah Daradjat, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 50.

aktif mengembangkan potensi yang dimiliki untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>3</sup> PAI memiliki standar kompetensi yang berbeda. Kompetensi tersebut meliputi psikomotorik dan afektif yang didukung dengan pengetahuan kognitif peserta didik dalam rangka mempertebal iman dan memperkuat ketakwaan kepada Allah Swt. Kompetensi dasar tersebut secara umum yaitu dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam,<sup>4</sup> sehingga pendidikan tidak terbatas penyampaian materi di sekolah saja namun juga penerapan di masyarakat.

Mulyasa mendefinisikan manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu sebuah pemikiran baru yang memberikan otonomi kepada pihak sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otoritas ini diberikan supaya pihak sekolah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan sekolah serta lebih tanggap dalam menyelesaikan kebutuhan sekolah.<sup>5</sup> MBS memiliki karakteristik sebagai berikut (1) pemberian hak otonomi kepada sekolah; (2) partisipasi wali murid dan masyarakat; (3) kepemimpinan yang profesional dan demokratis; (4) *team work* yang transparan dan kompak.<sup>6</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 27, disebutkan bahwa prinsip MBS yaitu kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>7</sup> Kemandirian menurut Depdiknas diartikan sebagai kewenangan sekolah dalam mengelola dan mengatur dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.<sup>8</sup> Kemandirian tersebut melingkup dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan sekolah. Menurut Surya Darma, kerjasama dimaknai sebagai suatu hubungan kerja antara petinggi dan bawahan dalam mengelola organisasi.<sup>9</sup> Hal ini dapat dilihat bahwa sekolah merupakan organisasi.

---

<sup>3</sup> Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)* (Bandung: Fokus Media, 2009), 2.

<sup>4</sup> Mokh Iman Firmansyah, “Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi,” *Taklim : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (1 September 2019): 79–90.

<sup>5</sup> Enco Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), 33.

<sup>6</sup> Akhmad Masduqi, “Pengelolaan Program Unggulan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren,” *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 5 Juli 2021, 01–14, <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.501>.

<sup>7</sup> Presiden Republik Indonesia, “PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan” (Pemerintah Pusat, 2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun2021>.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan* (Jakarta: Direktorat Mandikdasmen, 2009), 40.

<sup>9</sup> Surya Dharma, *Menumbuhkan Semangat Kerjasama* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 5.

Sedangkan organisasi yang kuat adalah organisasi yang memiliki kerjasama dengan pemangku kepentingan agar tujuan sekolah dapat tercapai.<sup>10</sup>

Dalam menilai keberhasilan kemitraan sekolah terdapat beberapa indikator yaitu (1) terciptanya tim hubungan masyarakat yang memiliki fungsi untuk menggalang kemitraan; (2) sekolah dapat melaksanakan kunjungan ke tempat lain dalam rangka pendidikan maupun kerjasama; (3) terciptanya kontrak kerja sama yang tertuang dalam MoU dengan pihak lain; (4) Terealisasinya berbagai program yang melibatkan pihak lain seperti magang atau pertukaran pelajar.<sup>11</sup> Depdiknas mendefinisikan partisipasi sebagai bentuk peran aktif *stakeholders* yang terdiri dari warga sekolah maupun masyarakat baik terlibat secara aktif ataupun pasif, secara kolektif atau individual dan langsung ataupun tidak langsung dalam program pendidikan sekolah.<sup>12</sup> Keterbukaan dalam pendidikan yaitu transparansi sekolah terkait dengan kebijakan dan kegiatan pembelajaran kepada publik, sehingga orang yang berkepentingan dengan pendidikan dapat mengakses informasi tersebut. Dapat diartikan bahwa keterbukaan sekolah kepada publik harus berifat jujur, tidak bohong, tidak curang, tidak ada manipulasi, dan transparan mengenai bagaimana program pendidikan di sekolah. Keterbukaan ini berlaku mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pengambilan keputusan, pengalokasian dana, dan lainnya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sekolah terhadap *stakeholders*nya (warga sekolah, masyarakat dan pemerintah) melalui pertemuan dan laporan secara terbuka.<sup>13</sup>

PAI dalam pelaksanaannya memiliki komponen-komponen penting. Komponen-komponen tersebut yaitu tujuan pembelajaran, pendidik, peserta didik, materi, metode dan evaluasi.<sup>14</sup> Sedangkan 7 komponen utama MBS yaitu (1) kurikulum dan pembelajaran; (2) peserta didik; (3) pendidik; (4) pembiayaan; (5) sarana dan prasarana; (6) hubungan sekolah dan masyarakat; (7) budaya dan lingkungan sekolah.<sup>15</sup> Dari 2 teori tersebut ditemukan hubungan yaitu bahwa kurikulum dan pembelajaran berkaitan erat dengan tujuan, materi, metode dan evaluasi PAI. Sebab di dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran mengandung rencana pembelajaran, metode yang akan dilaksanakan, materi yang akan

<sup>10</sup> Firdaus Firdaus dan Hermawan Hermawan, "Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren Di SMP Muhammadiyah Jono Bayan Purworejo," *Tamaddun : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan* 22, no. 2 (6 Juli 2021): 113–20, <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v22i2.3610>.

<sup>11</sup> Nasional, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 64.

<sup>12</sup> Nasional, 43.

<sup>13</sup> Nasional, 45.

<sup>14</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri)*, 1 ed. (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), 107.

<sup>15</sup> Mustiningsih Mustiningsih dan T Subarkah, *Panduan Nasional MBS - Sekolah Dasar* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, 2013), 15.

diajarkan serta tujuan yang diharapkan. Dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui efektifitas kurikulum. Komponen pendidik berkaitan dengan komponen manajemen pendidik. Komponen peserta didik berkaitan dengan komponen manajemen peserta didik. Komponen manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat serta budaya dan lingkungan berkaitan dengan metode. Untuk menentukan metode pembelajaran yang efektif perlu disesuaikan dengan persediaan dana, sarana dan prasarana serta kondisi budaya dan lingkungan sekolah. Adapun hubungan sekolah dan masyarakat digunakan sebagai penunjang metode pembelajaran agar lebih efektif. Semua komponen MBS berhubungan dengan komponen evaluasi. Evaluasi sangat dibutuhkan untuk menilai keberhasilan suatu program serta untuk meningkatkan kualitas program.

Berdasarkan teori dan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk (1) menjelaskan pendidikan agama Islam di SMA Al Mas`udiyyah berdasarkan prinsip kemandirian, (2) menjelaskan pendidikan agama Islam di SMA Al Mas`udiyyah berdasarkan prinsip partisipasi dan (3) menjelaskan pendidikan agama Islam di SMA Al Mas`udiyyah berdasarkan prinsip keterbukaan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang bertujuan memperoleh data yang akurat, lengkap dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil berupa informasi yang mendalam mengenai PAI dengan dengan prinsip-prinsip MBS dengan metode kualitatif.

Sumber data yang dikumpulkan ini dikelompokan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang peneliti dapatkan secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode pengambilan data pada subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>16</sup> Data primer juga bisa diambil dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh melalui wawancara ini diambil dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, kesiswaan, humas, sarpras, dan guru PAI SMA Al-Mas`udiyyah Bandungan Semarang.

Data sekunder yang diperoleh peneliti diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data sekolah dan literatur yang relevan dengan pembahasan. Tahap-tahap penelitian ini berpedoman pada pendapat Moleong yakni terdiri dari; tahap pra

---

<sup>16</sup> Marzuki Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: BPFE-UII, 2000), 57.

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap pelaporan hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### *Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Prinsip Kemandirian*

SMA Al Mas`udiyyah dalam pengembangan kurikulum PAI mengacu pada K-13. Kurikulum PAI disusun oleh tenaga pendidik PAI beserta wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan dikemukakan melalui rapat sekolah yang diikuti oleh segenap civitas akademika sekolah. Dalam rapat tersebut, rancangan kurikulum dipresentasikan dan dimusyawarahkan bersama. Bila dicapai mufakat maka kurikulum tersebut siap untuk dilaksanakan.

Setelah rancangan kurikulum disetujui, tenaga pendidik PAI melanjutkan membuat silabus dan rancangan pembelajaran. Pada pembuatan silabus dan rancangan pembelajaran, tenaga pendidik PAI harus berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Kemudian tenaga pendidik melaksanakan pembelajaran dengan berbagai metode seperti ceramah, tanya jawab, diskusi maupun dengan memberikan tugas kepada peserta didik.

Pada evaluasi hasil pembelajaran, tenaga pendidik menyusun laporan hasil belajar peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran secara mandiri menggunakan metode dan teknik penilaian kompetensi mata pelajaran. Setiap akhir semester, tenaga pendidik juga menyusun laporan pembeajaran berupa nilai dan evaluasi untuk peserta didik. Adapun penilaian yang diterapkan melalui soal tulis, ujian praktik, dan memantau akhlak peserta didik selama di sekolah.

Pengembangan kurikulum di SMA Al Mas`udiyyah berdasarkan paparan di atas sudah sesuai dengan definisi prinsip kemandirian menurut Depdiknas. Depdiknas mengartikan kemandirian sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri tanpa ketergantungan dengan pihak lain.<sup>17</sup> Dalam pengembangan kurikulumnya, SMA Al Mas`udiyyah menentukan sendiri kurikulum untuk peserta didiknya tanpa bergantung dan mengikuti perintah dari pihak lain.

SMA Al Mas`udiyyah memiliki total 23 tenaga pendidik. Adapun tenaga pendidik pemangku mata pelajaran PAI berjumlah 1 orang. Sedangkan dalam pengadaannya, SMA Al Mas`udiyyah mencari secara mandiri tanpa mengandalkan pihak lain. Pengadaan guru di SMA Al Mas`udiyyah sesuai dengan pendapat Surya Darma bahwa kemandirian sekolah

<sup>17</sup> Nasional, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 40.

dapat dikatakan berjalan lancar apabila mampu memenuhi kebutuhan sekolah itu sendiri.<sup>18</sup> Tenaga pendidik merupakan kebutuhan sekolah, sedangkan kemampuan pengadaan tenaga pendidik merupakan salah satu indikator kemandirian sekolah.

SMA Al Mas`udiyyah juga menerapkan standar ketat untuk calon tenaga pendidik. Calon tenaga pendidik khususnya PAI diharuskan memiliki pendidikan agama yang mendalam. Pihak sekolah pun memprioritaskan alumni pesantren. Hal ini dilakukan agar tenaga pendidik pemangku PAI lebih menguasai materi yang akan diajarkan dan lebih mudah mengambil hati peserta didik, di mana peserta didik juga merupakan santri. Ketika hal itu dapat diwujudkan, maka pelaksanaan pembelajaran akan efektif dan kondusif.

Depdiknas juga menyatakan bahwa sekolah dapat mandiri apabila didukung sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang cukup, dan sumber dana dalam melaksanakan program pendidikan.<sup>19</sup> Dengan adanya sarana yang memadai, maka kegiatan pembelajaran diharapkan akan terlaksana dengan kondusif. Apabila pembelajaran terlaksana dengan lancar, maka tujuan pembelajaran akan mudah dicapai.

SMA Al Mas`udiyyah memiliki sarana yang mencukupi: memiliki 15 ruang kelas, 3 laboratorium, dan 1 perpustakaan, dan 1 mushola untuk mendukung kegiatan keagamaan di sekolah beserta buku-buku keagamaan di perpustakaan.

### ***Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Prinsip Partisipasi***

Depdiknas mendefinisikan prinsip partisipasi sebagai bentuk peran aktif *stakeholders* yang terdiri dari warga sekolah maupun masyarakat baik terlibat secara aktif ataupun pasif, secara kolektif atau individual dan langsung ataupun tidak langsung dalam program pendidikan sekolah.<sup>20</sup> Dalam pelaksanaan pembelajaran, SMA Al Mas`udiyyah memiliki dukungan partisipasi oleh warga internal sekolah dan warga eksternal sekolah. Partisipasi yang didapat berupa dukungan, ide, jasa maupun kritik dan saran.

Partisipan internal dalam pembelajaran PAI di SMA Al Mas`udiyyah yakni para peserta didik itu sendiri. Para peserta didik aktif memberikan partisipasi pada pembelajaran PAI di kelas masing-masing. Peserta didik tidak segan untuk bertanya kepada tenaga pendidik mengenai masalah pemahaman dalam agama Islam. Peserta didik juga aktif dalam diskusi dan tanya jawab yang diberikan oleh tenaga pendidik. Peserta didik juga tidak segan untuk bertanya kepada tenaga pendidik terkait problematika masalah keagamaan. Partisipasi

<sup>18</sup> Dharma, *Menumbuhkan Semangat Kerjasama*, 40.

<sup>19</sup> Nasional, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 59.

<sup>20</sup> Nasional, 43.



tersebut diharapkan memberikan nilai positif dalam bentuk peningkatan pemahaman peserta didik.

Adapun partisipan eksternal SMA Al Mas`udiyah yaitu dari warga setempat, pesantren, dan pemerintah. Partisipasi dari warga setempat umumnya berbentuk kritik dan saran terhadap pendidikan di sekolah. Namun, tak jarang juga warga ikut berdonasi demi perkembangan sekolah. Pesantren di sekitar SMA juga memiliki peran akif untuk perkembangan PAI. Di pesantren, peserta didik diberikan materi ilmu keagamaan secara mendalam. Tidak hanya sekadar materi namun juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, peserta didik tidak menemukan kesulitan dalam mempelajari PAI. Adapun partisipasi dari pemerintah berupa penyuluhan terhadap kinerja tenaga pendidik agar lebih berkualitas dan bantuan buku paket.

### ***Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Prinsip Keterbukaan***

Prinsip keterbukaan dalam PAI di SMA Al Mas`udiyah diterapkan semenjak dari penentuan kurikulum. Dalam penentuan kurikulum tenaga pendidik dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum akan merancang kurikulum PAI yang akan diterapkan di sekolah. Rancangan tersebut kemudian dipresentasikan dalam rapat bersama warga sekolah. Tenaga pendidik pengampu mata pelajaran PAI juga setiap semester memberikan laporan hasil belajar dan rancangan pendidikan setiap awal semester dalam rapat bersama tenaga pendidik dan staf sekolah, sehingga seluruh warga sekolah juga mengetahui rancangan kurikulum yang direncanakan oleh tenaga pendidik beserta dengan standar kompetensi yang diinginkan.

Prinsip keterbukaan ini juga diterapkan oleh sekolah dengan memberikan rapor kepada wali murid sehingga wali murid mengetahui perkembangan belajar anak mereka. Sekolah juga menggelar pertemuan dengan masyarakat yang terdiri dari wali murid, tokoh penting perwakilan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut sekolah menjelaskan tentang program pendidikan di sekolah dan membuka kritik dan saran dari masyarakat. Sekolah juga membuka akses informasi untuk masyarakat terkait pendidikan. Informasi ini dapat diakses melalui komite sekolah maupun dengan mendatangi sekolah. Prinsip keterbukaan yang dilaksanakan oleh SMA Al Mas`udiyah sesuai dengan definisi Depdiknas mengenai keterbukaan dalam pendidikan yaitu transparansi sekolah terkait dengan kebijakan dan

kegiatan pembelajaran kepada publik, sehingga orang yang berkepentingan dengan pendidikan dapat mengakses informasi tersebut.<sup>21</sup>

## Kesimpulan

Prinsip kemandirian dalam PAI di SMA Al Mas`udiyyah diterapkan dalam 3 hal yaitu, a) pengembangan kurikulum, b) pengadaan tenaga pendidik pengampu mata pelajaran agama Islam, dan c) sarana prasarana pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum PAI, tenaga pendidik mata pelajaran terkait beserta wakil kepala sekolah bagian kurikulum merupakan perancang kurikulum tersebut tanpa bantuan pihak lain. Sedangkan dalam pencarian tenaga pendidik, sekolah membuka lowongan pekerjaan namun juga menerima rekomendasi tenaga pendidik. Sekolah menerapkan seleksi ketat untuk calon pendidik terlebih tenaga pendidik yang memegang PAI. Adapun perihal sarana prasarana, SMA Al Mas`udiyyah memiliki sarana yang cukup untuk mendukung pembelajaran PAI.

Prinsip partisipasi dalam PAI di SMA Al Mas`udiyyah diterapkan melalui partisipan internal dan eksternal. Partisipan internal yaitu dari peserta didik sendiri. Bentuk partisipasi peserta didik dalam mata pelajaran PAI yaitu melalui aktif dalam pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan mengerjakan tugas. Partisipasi eksternal yaitu pertisipasi dari masyarakat, pesantren dan pemerintah. Bentuk partispasi masyarakat yakni melalui kritik dan saran yang membangun. Partisipasi pesantren yakni melalui pendidikan agama di pesantren sehingga peserta didik tidak mengalami kesulitan memahami materi di sekolah. Adapun partisipasi dari pemerintah yakni melalui penyuluhan dan bantuan berupa buku pembelajaran.

Prinsip keterbukaan dalm PAI di SMA Al Mas`udiyyah diterapkan mulai dari lingkup sekolah hingga lingkup masyarakat. Keterbukaan dalam lingkup sekolah yakni tenaga pendidik memberikan presentasi rencana pembelajaran berikut laporan pembelajaran kepada warga sekolah melalui rapat. Adapun keterbukaan dengan lingkup eksternal yakni tenaga pendidik memberikan raport hasil belajar kepada wali murid agar mereka mengetahui perkembangan anak. Sekolah juga memberikan sosialisasi program pendidikan kepada masyarakat melalui pertemuan dan membuka akses informasi untuk masyarakat melalui komite atau mendatangi langsung sekolah.

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I Konsep dan Pelaksanaan* (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2001), 16.

## Daftar Rujukan

- Daradjat, Zakiah. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Dharma, Surya. *Menumbuhkan Semangat Kerjasama*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Firdaus, Firdaus, dan Hermawan Hermawan. "Manajemen Kurikulum Berbasis Pesantren Di SMP Muhammadiyah Jono Bayan Purworejo." *Tamaddun: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Keagamaan* 22, no. 2 (6 Juli 2021): 113–20. <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v22i2.3610>.
- Firmansyah, Mokh Iman. "Pendidikan Agama Islam: Pengertian, Tujuan, Dasar, dan Fungsi." *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (1 September 2019): 79–90.
- Indonesia, Presiden Republik. "PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan." Pemerintah Pusat, 2021. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/165024/pp-no-57-tahun2021>.
- Marzuki, Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFE-UII, 2000.
- Masduqi, Akhmad. "Pengelolaan Program Unggulan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Pesantren." *AT-TA'DIB: JURNAL ILMIAH PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 5 Juli 2021, 01–14. <https://doi.org/10.47498/tadib.v13i01.501>.
- Media, Tim Redaksi Fokus. *Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2003 SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional)*. Bandung: Fokus Media, 2009.
- Minarti, Sri. *Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara mandiri)*. 1 ed. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.
- Mulyasa, Enco. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mustiningsih, Mustiningsih, dan T Subarkah. *Panduan Nasional MBS - Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen Kemdikbud, 2013.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Manajemen Berbasis Sekolah dalam Kerangka Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Mandikdasmen, 2009.
- . *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku I Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2001.
- Rofie, Moh. "Manajemen Kurikulum Pendidikan Agama Islam Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Tarbiyatul Muallimien Al-Islamiyah Al-Amien Prenduan)." *Reflektika* 12, no. 2 (14 Februari 2018): 149–69. <https://doi.org/10.28944/reflektika.v12i2.104>.

